KEMENTERIAN KEUANGAN RI						
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK						

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

//									
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.1 H.2					H.4 X Final H.5 Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG									
A.1 NPWP : 08 330 769 4 721 000									
A.2 NIK :									
A.3 Nama : DRADJAT WITJAKSONO									
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG									
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2		B.3		B.4	B.5	B.6	B.7		
	3 21-402-01			2.922.900	2.922.900	0	5	146.145	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota									
B.8	Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 026/SP2D-GU/BLUD-RSJDAHM/III/2022								
Nama Dokui			ımen	nen Biaya Pembayaran Tanggal 1 6 dd 0 3 mm 2 0 2 2 уууу					
B.9									
	Nomor: Tanggal dd mm								
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :									
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :									
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK									
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0									
C.2	-···			RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					
C.3	C.3 ID Subunit Organisasi :								
C.4	Tanggal : 1 (1 6	dd 0 3 mm	2 0 2 2 yyyy			_	
C.5			UMADI						
				Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya andatangani secara elektronik.					
				Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.					

VDZQ1K7P